

ABSTRAK

Rahmi Sarah Paramita. NIM. 3113111050. Peranan Lembaga Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di KPAID Provinsi Sumatera Utara). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian dilakukan di KPAID Provinsi Sumatera Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh komisioner KPAID Provinsi Sumatera Utara dan sampelnya adalah seluruh populasi yaitu komisioner KPAID Provinsi Sumatera Utara sebanyak 9 (sembilan) orang. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas dari penelitian ini adalah peranan lembaga perlindungan anak. Sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data adalah wawancara dan arsip/dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah data tersebut diolah dengan analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mempelajari setiap hasil penelitian yang kemudian dijabarkan secara sistematis. Dalam penelitian ini, diperoleh hasil penelitian bahwa kasus kekerasan seksual pada anak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa KPAID Provinsi Sumatera Utara sudah menjalankan peranannya dengan baik namun belum sepenuhnya maksimal. Peranan KPAID Provinsi Sumatera Utara antara lain merumuskan kebijakan tentang perlindungan anak, melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, mendesak pemerintah provinsi untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, mendesak kabupaten/kota membentuk KPAID Kabupaten/Kota, serta mendesak KPAID Kabupaten/Kota untuk membuat kebijakan tentang perlindungan anak. Kendala yang dihadapi KPAID Provinsi Sumatera Utara dalam menangani kasus kekerasan seksual cukup banyak, diantaranya masalah sarana dan prasarana yang tidak mendukung sehingga proses penanganan korban tidak maksimal dan kurangnya bukti atau saksi yang dapat menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak.